



**Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga (UP2K): Analisis Kesesuaian Program, Organisasi
Pelaksana, dan Kelompok Sasaran di Desa Tulusrejo
Kabupaten Lampung Timur**

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Eka Saputri Universitas Dharma Wacana saputrieka158@gmail.com Sudarman Mersa Universitas Dharma Wacana mersadarma454@gmail.com Yuditya Wardhana Universitas Dharma Wacana yuditya5290@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 6, No. 1, April 2026 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Saputri, E., Mersa, S., & Wardhana, Y. (2026). Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K): Analisis Kesesuaian Program, Organisasi Pelaksana, dan Kelompok Sasaran di Desa Tulusrejo Kabupaten Lampung Timur. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(1), 1708-1715.

Abstrak

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga melalui penyediaan bantuan permodalan usaha. Namun, implementasi program di Desa Tulusrejo, Kabupaten Lampung Timur, belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Berbagai permasalahan masih ditemukan, antara lain pemanfaatan dana yang belum sepenuhnya produktif, rendahnya pembinaan dan pendampingan usaha, serta belum optimalnya ketepatan sasaran penerima manfaat. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Program UP2K menggunakan Model Kesesuaian Implementasi David C. Korten yang menekankan kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri atas Ketua Poksus UP2K, Sekretaris Poksus, Ketua Poklak, dan anggota UP2K sebagai penerima manfaat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program UP2K telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai sumber permodalan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Organisasi pelaksana mampu menjalankan fungsi administrasi dan pengelolaan program dengan baik, namun kapasitas dalam pembinaan dan pendampingan usaha masih terbatas. Dari sisi kelompok sasaran, penerima manfaat umumnya telah sesuai dengan kriteria program, tetapi sebagian masih memanfaatkan dana untuk kebutuhan konsumtif sehingga tujuan peningkatan pendapatan keluarga belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme seleksi penerima manfaat, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta pengawasan penggunaan dana agar implementasi Program UP2K lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, UP2K, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga.

Abstract

The Family Income Enhancement Business Program (UP2K) is an economic empowerment initiative aimed at boosting family income and welfare by providing business capital assistance. However, the program's implementation in Tulusrejo Village, East Lampung Regency, has not fully achieved its intended goals. Various issues persist, including the use of funds for non-productive purposes, insufficient business guidance and mentoring, and suboptimal targeting of beneficiaries. This study aims to analyze the UP2K Program's implementation using David C. Korten's Implementation Fit Model, which emphasizes the alignment between the program, the implementing organization, and the target group. A qualitative descriptive approach was employed, with data collected through interviews, observation, and documentation. Informants were selected using purposive sampling and included the UP2K Special Working Group (Poksus) Chairperson, the Poksus Secretary, the Operational Working Group (Poklak) Chairperson, and UP2K members serving as beneficiaries. Data analysis utilized the Miles and Huberman interactive model, involving data reduction, data display, and conclusion drawing. The results indicate that the UP2K Program aligns with community needs by serving as a source of capital for low-income families. The implementing organization effectively manages administrative and operational functions, though its capacity for providing business guidance and mentoring remains limited. Regarding the target group, while beneficiaries generally meet the program criteria, some still utilize the funds for consumption rather than productive investment, preventing the goal of increased family income from being fully realized. Therefore, it is necessary to strengthen beneficiary selection mechanisms, entrepreneurship training, business mentoring, and the monitoring of fund usage to ensure the UP2K Program is more effective in enhancing family welfare.

Keywords: Policy Implementation, UP2K, Community Empowerment, Family Welfare.

A. Pendahuluan

Kesejahteraan adalah kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dari aspek material, spiritual, maupun sosial (Nisa & Ndoda, 2024). Dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan partisipasi dalam masyarakat (Fajar et al., 2025). Kesejahteraan tidak hanya mencakup aspek ekonomi seperti pendapatan atau daya beli, tetapi juga melibatkan pemenuhan hak sosial, rasa keadilan, dan kesempatan untuk hidup secara bermartabat. Dalam konteks pengembangan masyarakat, kesejahteraan sering menjadi tujuan utama dari berbagai program pemerintah, termasuk program pemberdayaan seperti Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K).

Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan salah satu inisiatif pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di tingkat desa (Nurfadillah, 2019). Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 B Tahun 1993 Tentang Pedoman Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga. UP2K (Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga) merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga baik secara perorangan maupun kelompok yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat (Windrati & Arbarini, 2025). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013, usaha ekonomi produktif dijelaskan sebagai kegiatan yang memanfaatkan sumber daya ekonomi untuk menghasilkan pendapatan tambahan bagi keluarga. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) diartikan sebagai bagian dari usaha ekonomi produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga melalui pengelolaan dana bergulir secara mandiri (Apriliyanti, 2024) (Purwana, 2019). Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) juga bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan wiraswasta keluarga, sebagai usaha memperluas lapangan kerja. Sasaran Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) adalah keluarga-keluarga yang berpenghasilan rendah baik yang belum ataupun yang telah memiliki

kegiatan usaha, dan berdasarkan hasil pengamatan benar-benar membutuhkan penambahan dana usaha. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan bagian dari program yang dikelola oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di tingkat desa/kelurahan (Ulfa Nabila, 2023). Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) merupakan bagian dari kegiatan Kelompok Kerja (POKJA) II Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang modalnya bersumber dari Inpres bantuan pembangunan desa atau bantuan lainnya dari pemerintah, bantuan luar negeri maupun dari sawadaya masyarakat itu sendiri.

Desa Tulus rejo di Kabupaten Lampung Timur menjadi salah satu desa yang mengembangkan program UP2K. Desa ini memiliki jumlah penduduk sebesar 3.612 jiwa (*Website Desa Tulusrejo.id*). Berdasarkan hasil survei awal didapatkan data penerima manfaat program UP2K di Desa Tulusrejo bulan November tahun 2025:

Tabel 1 Pengguna UP2K November 2025

No	Nama	Alamat	Jenis usaha	Jumlah peminjaman
1	Sugiati	Dusun 1	Sawah	Rp. 1.000.000,-
2	Rita	Dusun 1	Online	Rp. 1.000.000,-
3	Leni	Dusun 1	Online	Rp. 1.000.000,-
4	Purwati	Dusun 1	Pembibitan	Rp. 1.000.000,-
5	Sartinah	Dusun 1	Pembibitan	Rp. 1.000.000,-
6	Dedik	Dusun 1	Pembibitan	Rp. 1.000.000,-
7	Pratiwi	Dusun 1	Online	Rp. 1.000.000,-
8	Desi	Dusun 2	Pembibitan	Rp. 1.000.000,-
9	Fita	Dusun 2	Online	Rp. 1.000.000,-
10	Sri hartati	Dusun 2	Pembibitan	Rp. 1.000.000,-
11	Hartini	Dusun 2	Warung	Rp. 1.000.000,-
12	Ponirah	Dusun 3	Warung	Rp. 1.000.000,-
13	Subali	Dusun 3	Sawah	Rp. 1.000.000,-
14	Sri k	Dusun 3	Sawah	Rp. 1.000.000,-
15	Kinasih	Dusun 3	Sawah	Rp. 1.000.000,-
16	Sutar	Dusun 4	Sawah	Rp. 1.000.000,-
17	Suyang	Dusun 4	Sawah	Rp. 1.000.000,-
18	Mail	Dusun 4	Pedagang keliling	Rp. 1.000.000,-

Sumber: diolah oleh peneliti, 2026

Berdasarkan Tabel 1, pada bulan November 2025 Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Tulusrejo memiliki 18 orang penerima manfaat yang tersebar di empat dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2, Dusun 3, dan Dusun 4. Seluruh penerima memperoleh bantuan pinjaman dengan nominal yang sama, yaitu Rp1.000.000,00 per orang. Dilihat dari jenis usahanya, mayoritas penerima bergerak pada sektor pertanian, yang meliputi usaha sawah sebanyak 6 orang dan pembibitan sebanyak 5 orang, sedangkan sisanya menjalankan usaha online sebanyak 4 orang, usaha warung sebanyak 2 orang, dan pedagang keliling sebanyak 1 orang. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa Program UP2K di Desa Tulusrejo lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang bekerja pada sektor pertanian, sesuai dengan karakteristik mata pencaharian penduduk desa. Namun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Desa Tulusrejo yang mencapai 3.612 jiwa, jumlah penerima manfaat masih relatif terbatas sehingga jangkauan program belum mampu mengakomodasi seluruh masyarakat yang berpotensi membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hasil observasi awal yang dilakukan pada Desa Tulusrejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur diketahui ada beberapa persoalan yang muncul berkaitan dengan Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) diantaranya yaitu: (1) Banyak anggota pengguna dana UP2K mengalami kesulitan dalam meningkatkan pendapatan mereka. Padahal, sesuai dengan tujuan program UP2K, seharusnya pengguna dana

ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga mereka. Idealnya, kondisi ekonomi mereka harus lebih baik dibandingkan dengan warga yang tidak memanfaatkan dana UP2K. Namun, kenyataannya, keadaan ekonomi mereka tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan. (2) Penggunaan Modal Yang Tidak Tepat, banyak anggota yang meminjam modal dari program UP2K tetapi seringkali mereka tidak mampu memanfaatkannya dengan optimal. Banyak peminjam menggunakan dana tersebut untuk kebutuhan sehari-hari bukan untuk keperluan usaha. misalnya seorang peminjam menggunakan uang pinjaman untuk membeli makan, membayar sekolah anak atau untuk kebutuhan sehari-hari lainnya. (3) Kurangnya Pelatihan Dan Pembinaan, di UP2K desa Tulusrejo sangat jarang diadakan acara pelatihan maupun pembinaan terhadap anggota pengguna dana UP2K. Padahal kurangnya pelatihan dan pembinaan bagi anggota program menjadi salah satu faktor penghambat dalam keberhasilan UP2K. Banyak anggota tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang manajemen usaha pemasaran dan inovasi produk tanpa dukungan ini mereka kesulitan untuk mengelola usaha secara efektif dan bersaing di pasar. (4) Banyak anggota peminjam UP2K namun tidak semua peminjam memiliki usaha yang aktif. Misalnya, seorang peminjam mendapatkan pinjaman untuk modal usaha tetapi tidak memiliki rencana atau ide usaha yang jelas. sehingga dana pinjaman tidak digunakan untuk kegiatan produktif. Padahal syarat menjadi anggota kelompok adalah keluarga yang mau berusaha maupun yang sudah memiliki usaha mikro dan kecil.

Urgensi penelitian ini didasarkan pada masih belum optimalnya implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sebagai salah satu program pemberdayaan ekonomi keluarga di tingkat desa. Meskipun Program UP2K dirancang untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui pemberian bantuan permodalan usaha, hasil observasi awal di Desa Tulusrejo menunjukkan bahwa tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi, peningkatan pendapatan, atau pemberdayaan perempuan, sementara aspek tata kelola program, efektivitas pelaksanaan, sinergi kelembagaan, serta peran pemerintah desa dalam mengoptimalkan implementasi program masih relatif sedikit dikaji. Padahal, keberhasilan suatu program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan atau modal usaha, tetapi juga oleh kualitas implementasi kebijakan, koordinasi lintas pemangku kepentingan, dan kemampuan organisasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting karena pemerintah desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Program UP2K menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah desa untuk meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga, memperluas kesempatan usaha, serta memperkuat peran perempuan dalam pembangunan desa. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai berbagai tantangan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, lemahnya pembinaan usaha, keterbatasan akses permodalan dan pemasaran, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah desa, TP PKK, dan instansi terkait. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari sisi akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian Administrasi Publik, khususnya mengenai implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat, tata kelola pemerintahan desa, dan pelayanan publik berbasis pemberdayaan perempuan. Sementara itu, dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah desa, TP PKK, serta pemerintah daerah dalam menyusun strategi penguatan Program UP2K agar lebih efektif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga secara nyata. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Tulusrejo, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada, penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti (Syahrizal & Jailani, 2023). penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi, menggambarkan, dan

mengklarifikasi suatu gejala, fenomena, maupun realitas sosial secara sistematis dengan menitikberatkan pada makna, proses, serta interaksi yang terjadi di lingkungan penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pelaksanaan Program UP2K, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Fokus penelitian mengacu pada Model Kesesuaian Implementasi David C. Korten yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi suatu program dipengaruhi oleh adanya kesesuaian antara tiga elemen utama, yaitu elemen program, elemen pelaksana, dan elemen kelompok sasaran (Hertati, 2024). Elemen program digunakan untuk menganalisis kesesuaian tujuan, mekanisme, dan manfaat Program UP2K dengan kebutuhan masyarakat. Elemen pelaksana mengkaji kemampuan organisasi pelaksana dalam mengelola program, meliputi kapasitas sumber daya manusia, koordinasi, pembagian tugas, serta pelaksanaan pembinaan kepada penerima manfaat. Sementara itu, elemen kelompok sasaran digunakan untuk menilai ketepatan penerima manfaat, tingkat partisipasi masyarakat, serta kemampuan kelompok sasaran dalam memanfaatkan bantuan modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Data penelitian diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang relevan dengan tujuan penelitian (Nashrullah, 2026). Informan dalam penelitian ini terdiri atas Ketua Poksus UP2K, Sekretaris Poksus, Ketua Poklak, serta anggota UP2K sebagai penerima manfaat program. Selain data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa dokumen administrasi, laporan kegiatan, profil desa, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Program UP2K.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Thalib, 2022). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data yang diperoleh sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan, dan temuan penelitian. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian melalui verifikasi terhadap data yang diperoleh, sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat menggambarkan implementasi Program UP2K berdasarkan perspektif Model Kesesuaian Implementasi David C. Korten.

C. Hasil dan Pembahasan

Elemen Program

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Tulusrejo telah dirancang untuk memberikan akses permodalan kepada keluarga berpenghasilan rendah sebagai upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga. Program yang sempat tidak berjalan kemudian diaktifkan kembali pada tahun 2022 dan memperoleh respons positif dari masyarakat. Kemudahan prosedur peminjaman, persyaratan yang relatif sederhana, serta besaran pinjaman yang sama bagi setiap penerima menunjukkan bahwa program telah mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan usaha. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum tujuan program telah sesuai dengan karakteristik masyarakat desa yang sebagian besar membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha produktif.

Apabila dianalisis menggunakan Model Kesesuaian Implementasi David C. Korten, temuan tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara elemen program dengan kebutuhan kelompok sasaran. Menurut Korten, suatu program dapat diimplementasikan secara efektif apabila tujuan, desain, dan mekanisme pelaksanaannya mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat. Dalam penelitian ini, kesesuaian tersebut tercermin dari tersedianya fasilitas pinjaman modal yang mudah diakses oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, kesesuaian tersebut belum sepenuhnya menghasilkan peningkatan kesejahteraan sebagaimana tujuan program. Hal ini disebabkan karena desain program masih berorientasi pada penyaluran dana, sedangkan aspek pembinaan usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan, serta monitoring penggunaan dana belum menjadi bagian yang terintegrasi dalam implementasi program. Akibatnya, sebagian penerima manfaat menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehingga manfaat ekonomi yang diharapkan belum tercapai.

secara optimal.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Windrati dan Arbarini (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan Program UP2K tidak hanya ditentukan oleh tersedianya bantuan modal, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas pendampingan dan pemberdayaan yang diberikan kepada penerima manfaat. Demikian pula penelitian Ulfa Nabila (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat bergantung pada kemampuan pelaksana dalam mengarahkan penggunaan bantuan agar tetap berorientasi pada kegiatan produktif. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa permasalahan utama implementasi di Desa Tulusrejo bukan terletak pada besarnya bantuan modal ataupun rendahnya minat masyarakat mengikuti program, melainkan pada belum optimalnya mekanisme pengawasan dan pembinaan setelah dana disalurkan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup diukur dari tersalurkannya bantuan, tetapi juga dari kemampuan program menghasilkan perubahan perilaku ekonomi penerima manfaat.

Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa bersama pengelola Program UP2K perlu mengembangkan desain implementasi yang lebih komprehensif. Program tidak lagi hanya berorientasi pada penyaluran pinjaman, tetapi juga harus disertai pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, monitoring penggunaan dana, serta evaluasi perkembangan usaha penerima manfaat secara berkala. Dengan demikian, bantuan modal tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga secara berkelanjutan.

Elemen Organisasi/Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi pelaksana Program UP2K yang terdiri atas Poksus dan Poklak telah menjalankan fungsi pengelolaan administrasi, penyaluran pinjaman, pencatatan keuangan, serta penagihan angsuran dengan cukup baik. Koordinasi antar pengurus berlangsung secara gotong royong dan mendapat dukungan dari pemerintah desa melalui penyediaan fasilitas maupun dukungan kelembagaan. Keberadaan pengurus yang dikenal masyarakat turut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program sehingga proses penyaluran dana dapat berjalan dengan relatif lancar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa organisasi pelaksana telah mampu menjalankan fungsi administratif sesuai dengan tugas yang diberikan.

Meskipun demikian, analisis berdasarkan Model Kesesuaian Implementasi David C. Korten menunjukkan bahwa kapasitas organisasi pelaksana belum sepenuhnya memenuhi tuntutan implementasi program. Korten menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kemampuan organisasi dalam menerjemahkan tujuan kebijakan ke dalam tindakan nyata melalui sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi yang efektif, serta mekanisme pembinaan yang berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran organisasi pelaksana masih lebih banyak berfokus pada aspek administrasi dan pengelolaan dana dibandingkan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pengurus belum secara optimal melaksanakan pembinaan usaha, pendampingan kepada penerima manfaat, maupun evaluasi terhadap perkembangan usaha yang dijalankan masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan organisasi belum mampu memastikan bahwa dana yang disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi produktif sesuai tujuan program.

Temuan ini memiliki kesamaan dengan penelitian Abdurrahman (2022) dan Darmiyanti (2022) yang menyatakan bahwa keterbatasan kapasitas organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan implementasi program pemberdayaan masyarakat belum berjalan secara optimal. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan karakteristik yang berbeda karena lemahnya implementasi bukan disebabkan oleh rendahnya koordinasi antar pengurus, melainkan oleh terbatasnya kapasitas organisasi dalam melaksanakan fungsi pendampingan dan pengembangan usaha masyarakat. Dengan kata lain, organisasi telah berhasil menjalankan fungsi administratif, tetapi belum mampu mengembangkan fungsi pemberdayaan sebagaimana yang diharapkan dalam implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan temuan tersebut, penguatan kapasitas organisasi pelaksana menjadi kebutuhan yang mendesak. Pemerintah desa perlu meningkatkan kompetensi pengurus melalui pelatihan manajemen program pemberdayaan, pengembangan kewirausahaan masyarakat, teknik pendampingan usaha, serta penyusunan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis. Selain itu, pembagian tugas antar pengurus perlu diarahkan tidak hanya pada pengelolaan administrasi, tetapi juga pada upaya memastikan keberhasilan usaha penerima

manfaat sehingga implementasi Program UP2K mampu mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif.

Elemen Kelompok Sasaran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelompok sasaran Program UP2K pada umumnya telah sesuai dengan kriteria penerima manfaat karena mayoritas merupakan keluarga berpenghasilan rendah yang membutuhkan tambahan modal usaha. Partisipasi masyarakat dalam mengikuti program tergolong tinggi dan sebagian besar penerima merasakan manfaat berupa kemudahan memperoleh akses permodalan dibandingkan sumber pembiayaan lainnya. Bagi penerima yang telah memiliki usaha, bantuan modal mampu mendukung keberlangsungan usaha dan mengurangi tekanan ekonomi keluarga. Hal tersebut menunjukkan bahwa program memperoleh penerimaan yang cukup baik dari masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Apabila dianalisis berdasarkan Model Kesesuaian Implementasi David C. Korten, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan penerima manfaat secara administratif, tetapi juga oleh kemampuan kelompok sasaran memanfaatkan program sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penerima telah memenuhi kriteria sebagai keluarga berpenghasilan rendah, masih terdapat penerima yang belum memiliki kesiapan menjalankan usaha maupun kemampuan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Akibatnya, sebagian dana pinjaman digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan konsumsi sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian kelompok sasaran belum sepenuhnya tercapai karena penerima manfaat belum memiliki kapasitas yang memadai untuk mengubah bantuan modal menjadi kegiatan ekonomi produktif yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Windrati dan Arbarini (2025) yang menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Program UP2K tidak hanya dipengaruhi oleh ketepatan sasaran, tetapi juga oleh kesiapan penerima manfaat dalam mengelola usaha secara produktif. Penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pemberdayaan sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi, pemahaman terhadap tujuan program, dan kemampuan masyarakat mengembangkan usaha setelah memperoleh bantuan modal. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa rendahnya efektivitas implementasi lebih banyak dipengaruhi oleh kurangnya pembinaan dan pendampingan kepada penerima manfaat dibandingkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat.

Implikasi dari temuan tersebut menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme penetapan kelompok sasaran dengan mempertimbangkan tidak hanya kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga kesiapan dan komitmen calon penerima dalam mengembangkan usaha produktif. Selain itu, pemerintah desa bersama pengelola Program UP2K perlu meningkatkan sosialisasi mengenai tujuan program, memberikan pelatihan kewirausahaan sebelum penyaluran dana, serta melakukan pendampingan dan evaluasi secara berkala. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan bantuan modal sehingga tujuan Program UP2K untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dapat diwujudkan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

D. Kesimpulan

Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di Desa Tulusrejo menunjukkan bahwa kesesuaian antara program, organisasi pelaksana, dan kelompok sasaran sebagaimana dikemukakan dalam Model Kesesuaian Implementasi David C. Korten telah terpenuhi pada aspek penyediaan akses permodalan, pengelolaan administrasi, dan penetapan penerima manfaat. Namun, kesesuaian tersebut belum mampu menghasilkan implementasi yang optimal karena masih lemahnya pembinaan usaha, pendampingan, serta pengawasan penggunaan dana, sehingga sebagian penerima memanfaatkan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi program pemberdayaan tidak hanya ditentukan oleh ketepatan desain program, tetapi juga oleh kapasitas organisasi pelaksana dan kesiapan kelompok sasaran dalam memanfaatkan bantuan secara produktif. Oleh karena itu, implementasi UP2K perlu diarahkan pada model pemberdayaan yang lebih terintegrasi melalui penguatan kapasitas kelembagaan, seleksi penerima yang lebih adaptif, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

E. Referensi

- Abdurrahman, E. S. (2022). Implementasi program kotak (kota tanpa kumuh) dalam mengatasi permukiman kumuh di kelurahan belimbing rayakecamatan murung pudak kabupaten tabalong. 5, 1–14.
- Apriliyanti, yuni; r. A. H. I. (2024). Pemberdayaan ekonomi kreatif dalam keluarga melalui program up2k-pkk di kecamatan lenteng. 1, 516–529.
- Darmiyanti, r. (2022). Implementasi program keluarga harapan (pkh) dalam pengentasan kemiskinan di kabupaten indragiri hilir tahun 2016- 2020. 1(1), 108–123.
- Fajar, s. Al, rais, m., & razak, r. (2025). Strategi pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa pattondonsalu kabupaten enrekang. 8(2).
- Hertati, z. 'izzah; d. (2024). Implementasi program padat karya dalam pengurangan pengangguran di kota surabaya : sebuah analisis. 6(1), 91–100.
- Nashrullah, m. K. H. S. A. (2026). Teknik pemilihan informan dalam penelitian kualitatif: strategi dan implementasi. 5(2), 1688–1696.
- Nisa, c., & ndoda, y. (2024). Konsep kesejahteraan sosial menurut masyarakat melayu di batubara. 2(3).
- Nurfadillah, s. U. (2019). Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program up2k-pkk di desa kayuambon lembang. 2, 90–100.
- Purwana, k. (2019). Efektivitas program usaha peningkatan pendapatan keluarga pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. 1467–1476.
- Syahrizal, h., & jailani, m. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1, 13–23.
- Thalib, m. A. (2022). Madani : jurnal pengabdian ilmiah pelatihan analisis data model miles dan huberman untuk riset akuntansi budaya. 5(1), 23–33.
- Ulfa nabila, e. S. (2023). Efektivitas program usaha peningkatan pendapatan keluarga-pemberdayaan dan. 3, 65–79.
- Windrati, Y., & Arbarini, M. (2025). *Analisis Pemberdayaan Masyarakat dengan Transformatif Learning Melalui Program Upaya Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) pada Keluarga Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Blora.* 20(1), 57–71.
<https://doi.org/10.17977/um041v20i12025p57-71>